

Judul : Ramai-ramai BUMN Disuntik Dana PMN
Tanggal : Selasa, 04 Oktober 2022
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 13

Ramai-Ramai BUMN Disuntik Dana PMN

Selain menyuntik dana PMN, pemerintah juga menarik setoran dividen dari sejumlah BUMN

**Dimas Andi Shadewo,
Venny S, Siti Masitoh**

JAKARTA. Pemerintah rajin menyuntik dana penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saban tahun. Selain untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional (PSN), sokongan PMN demi memulihkan kinerja yang sedang sakit.

Komisi XI DPR RI baru saja menyetujui PMN kepada PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) melalui mekanisme *rights issue* senilai Rp 7,5 triliun. "Saya putuskan kita semua (pemerintah dan Komisi XI DPR RI) setuju (PMN Garuda Rp 7,5 triliun)," kata Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir, saat rapat kerja bersama Direktur Jendral Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiapatra, Senin (26/9).

Pada awal tahun, pemerintah mengucurkan dana PMN mencapai Rp 38,5 triliun kepada tujuh BUMN. Kabar terbaru, PT Hutama Karya meminta restu kepada DPR RI untuk penyuntikan PMN sebesar Rp 7,5 triliun yang berasal dari cadangan pembiayaan APBN 2022. PMN ini untuk membiayai proses konstruksi

lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kelima jalan tol itu adalah ruas Sigli-Banda Aceh Rp 2,83 triliun, Kisaran-Indrapura Rp 1,13 triliun, Pekanbaru-Dumai Rp 1,14 triliun, Indralaya-Muara Enim Rp 2,31 triliun dan Penanjung-Bengkulu Rp 97 miliar.

"Saat ini, JTTS telah beroperasi sepanjang 547 kilometer (km) dan akan menjadi 1.050 km pada 2023," kata Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dalam RDP Komisi XI DPR RI, Senin (3/10).

Sebelumnya, Hutama Karya telah dipastikan meraih PMN periode I sebesar Rp 23,85 triliun dari APBN 2022 yang dalam proses pencairan. Alhasil, total PMN Hutama Karya mencapai Rp 31,35 triliun.

PMN akan memangkas liabilitas Hutama Karya yang berimplikasi pada penurunan beban bunga yang harus dibayar BUMN tersebut. Hutama Karya menderita rugi Rp 2,03 triliun pada 2020 dan Rp 2,40 triliun pada 2021 seiring beroperasinya JTTS, sehingga bunga pinjaman mulai berjalan. "Di sisi lain, sebagian besar ruas JTTS tak menghasilkan pendapatan sesuai studi kelayakan rencana awal," kata Dirjen Kekayaan Negara Kemenuk Rionald Silaban.

PT Kereta Api juga meraih PMN 2022 sebesar Rp 4,1 triliun yang telah disetujui Komisi VI DPR RI. "PMN yang diajukan sepenuhnya untuk penyelesaian proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)," imbuh Joni Martinus, VP *Public Relations* KAI, kemarin.

Joni mengklaim proyek KCJB masih berjalan sesuai rencana, dan progres investasi proyek itu setara 86%. Proyek ini ditargetkan beroperasi secara komersial pada pertengahan 2023.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga mendapat persetujuan penambahan PMN senilai Rp 1,98 triliun. Dana ini diharapkan cair pada kuartal IV-2022 melalui *rights issue*. "Saat ini *rights issue* dalam tahap registrasi OJK," ucap *Corporate Secretary* Adhi Karya Farid Budiyanto, Senin (3/10).

Di saat menyuntik PMN, pemerintah juga menarik setoran dividen kepada BUMN. Hingga Juli 2022, pemerintah telah mengantongi Pendapatan Negara Bukan Pajak

(PNBP) sebesar Rp 37,91 triliun yang berasal dari setoran dividen BUMN.

Setoran dividen BUMN pada 2019 atau pra pandemi Covid-19 tercatat Rp 50,63 triliun, naik 12% dari 2018 yang sebesar Rp 45,06 triliun.

Saat pandemi Covid-19 atau pada 2020, setoran dividen turun 12% menjadi Rp 44,60 triliun. Bahkan penurunan berlanjut pada 2021 sebesar 32%, sehingga pemerintah hanya mengantongi dividen sebesar Rp 30 triliun.

